

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SASINDO UNPAM

VOLUME 2 NO. 2, MEI 2022

KRISIS MINYAK GORENG KAJIAN FILOSOFI OLIGARKI DAN FILOSOFI NEGARA

Mohamad Ramdon Dasuki
Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang
mramdondasuki@gmail.com

Diterima: 20 Mei 2022

Direvisi: 24 Mei 2022

Disetujui: 25 Mei 2022

ABSTRAK

Fenomena beberapa waktu lalu membuat seluruh mata terperangah, kata-kata singkat yang pantas ditujukan kepada para spekulasi pasar minyak goreng mungkin; tega-teganya para pelaku pasar ekonomi dalam negeri ini memainkan harga hingga rakyat menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk memperbaiki urusan dapur mereka setelah badai berturut-turut menimpa masyarakat menengah ke bawah ini. Setelah dua tahun lamanya diharuskan bekerja dan beraktifitas di dalam rumah saja karena *lockdown* termasuk anak-anak sekolah dan kuliah ikut turut di *lockdown* sehingga harus bertahan hidup di rumah saja, hingga tidak sedikit anggota keluarga terkena PHK, dirumahkan, sepiunya dunia usaha, pengurangan tenaga kerja, dan lain sebagainya sehingga krisis minyak goreng menjadi semakin komplis kesulitan dapur dan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan fenomena inilah kiniscayaan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah beserta aparaturnya yang terkait menjadi kemutlakan memunculkan beberapa pertanyaan besar karena peran para oligarki yang seringkali turut mewarnai. Penulis akhirnya menggarisbawahi di sini jika bangunan filosofi negara yang bercirikan keadilan sosial sedang dipertaruhkan berhadapan dengan bangunan filosofi para pengusaha yang bercirikan profit ekonomis sedang dipertontonkan di hadapan khalayak ramai.

Kata Kunci: filosofi negara, filosofi oligarki, krisis minyak goreng

PENDAHULUAN

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹ merupakan salah satu sila dari lima sila yang menjadi dasar negara ini telah lama diperjuangkan dan akan terus diperjuangkan oleh bangsa ini, yang setiap masa akan selalu diuji eksistensinya.

Salah satu bentuknya saat terjadi krisis minyak goreng yang baru saja terjadi belum lama ini, bagaimana cita-cita para pendiri bangsa ini telah sepakat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dua cita-cita utama kemerdekaan negeri ini; mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa semakin dipertaruhkan.

Walau telah cukup lama negeri ini merdeka namun kesejahteraan masih juga belum terwujud, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali terus menghalangi cita-cita bangsa ini belum juga tercapai. Walaupun telah jelas-jelas dinyatakan sejak awal merdekanya negeri ini bukanlah ingin menjadi negara kapitalis juga bukan negara sosialis yang anti kapitalis, negeri ini mencita-citakan kelak masyarakatnya 'yang berkeadilan sosial' seperti tersebut di atas.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode kritis-komparatif antara dua bangunan filosofi yang berbeda; filosofi negara yang berorientasikan pada keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan filosofi oligarki² (kekuatan pengusaha) yang berorientasikan keuntungan ekonomi.

Terjadinya benturan yang cukup serius antara dua kepentingan yang sulit dipertemukan karena terjadi perbedaan sudut pandang dan perbedaan kepentingan antara dua lembaga; lembaga negara dalam hal ini pemerintah dan lembaga ekonomi dalam hal ini para pengusaha atau sering disebut para oligarki.

Sebagaimana imbas dari benturan dua lembaga besar dalam kehidupan masyarakat ini tentu akan berikan dampak negatif bisa juga dampak positif, karena dua lembaga ini sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Diharapkan dengan metode kritis-komparatif dari dua lembaga ini dapat berikan simpulan yang memadai untuk temukan titik temu atau pengurai persoalan kasus kelangkaan minyak goreng yang sempat menyeruak di publik belum lama ini.

¹Teori keadilan sosial yang ideal adalah terekomendasinya nilai-nilai teologis dan lainnya, yaitu pemenuhan kewajiban-kewajiban individu dengan tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak individu yang selama ini terabaikan. Hal itu dilakukan secara individual maupun secara kelembagaan (politik/negara, hukum/peradilan dan perangkatannya, ekonomi/pedagang dan pengusaha, lembaga keagamaan/ulama) sehingga akan terwujud keadilan sosial dan menjadi penentu terwujud tidaknya suatu keadilan sosial. Lihat; Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial al-Ghazali Dan John Rawls -Studi Perbandingan Dalam Konteks Politik Dan Hukum-* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2015), hal.325

²Menurut Wikipedia *oligarchia*; *oligo* berarti: sedikit, dan *archy* berarti: aturan. Oligarki itu sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. 25/05/2022.

PEMBAHASAN

A. Teori Ekonomi Terbantahkan

Peristiwa besar yang memalukan banyak pihak akhirnya terjadi dan banyak kalangan sebut ini dilakukan oleh para pengusaha minyak sawit, hampir berbarengan di masa redanya masa pandemi setelah dua tahun lamanya rakyat harus ditahan beraktifitas secara bebas.

Tujuan cita-cita dahulu negeri ini merdeka di tahun 1945 jelas-jelas tercantum di *preambole* UUD 1945 pertama ; mencerdaskan kehidupan bangsa dan kedua; mensejahterakan kehidupan bangsa. Sangat jelas dan sederhana tetapi mendalam dan menyeluruh.

Sebagian kalangan bahkan berani mengatakan bahwa para pengusaha dan oknum-oknum yang bermain dibalik permainan ini sudah keterlaluan, karena telah secara langsung menggoyahkan kehidupan sosial masyarakat luas. Sementara kebun kelapa sawit itu hidup dan tumbuh di atas tanah air negeri ini, yang secara *de jure* dimiliki oleh seluruh rakyat negeri ini walaupun secara *de facto* dimiliki oleh mereka. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh negara dalam pasal lain bahwa negara berkewajiban untuk mengelola seluruh tanah dan air beserta seluruh apa yang terkandung di dalamnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sebesar-besarnya.

Jika teori ekonomi yang sering dihafal oleh murid dan mahasiswa, selama barang itu banyak beredar di pasar maka barang akan murah sementara ketika barang beredar sedikit maka teorinya barang akan menjadi mahal, kini sudah tidak berlaku lagi seperti yang baru saja kita saksikan bersama.

Dengan kata lain mulai saat ini para guru ekonomi di negeri ini sudah waktunya ajarkan bahwa teori itu telah terbantahkan, oleh karena perilaku para pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan membiarkan rakyat kebanyakan untuk hidup susah. Apapun alasannya sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi di negeri yang jelas-jelas menerapkan sistem ekonomi sosial kerakyatan, bukan sistem kapitalis seperti di Barat yang membolehkan penumpukan kekayaan seluas-luasnya bukan pula sosialis-komunis yang sama rasa sama rata.

Negeri ini merdeka jelas bercita-citakan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, bukan untuk mensejahterakan kehidupan para pengusaha atau oligarki saja yang memiliki banyak modal kapital.

Sementara negara seharusnya hadir dan membuktikan perannya sebagai penyelenggara negara, yang tidak hanya keras berkoar-koar jika ada terorisme dan radikalisme yang membahayakan kedaulatan negeri. Tetapi ragu-ragu ketika terjadi aksi para oligarki yang jelas-jelas telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial rakyat negeri ini.

Teroris yang merongrong kehidupan bernegara jelas salah dan harus dibereskan sebagaimana juga permainan oligarki yang menyusahkan kehidupan rakyat juga jelas harus dibereskan sama tegasnya saat menghadapi para teroris itu.

Jika para teroris membahayakan negara tapi oligarki ini telah jelas-jelas terbukti menghancurkan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Hal lain yang jauh memprihatinkan

adalah bentuk kesalehan sosial yang selama ini didengung-dengungkan oleh seluruh guru sekolah dan dosen seluruh universitas di negeri ini seakan sirna secara sekejap. Apakah pertanda prediksi Francis Fukuyama tentang ‘negara gagal’ di abad ke-21 akan menghampiri negeri ini.³

B. Filosofi Oligarki Versus Filosofi Negara

Benturan antara filosofi oligarki terhadap filosofi negara benar-benar telah terjadi beberapa waktu lalu hingga tata kelola pemerintahan dan kenegaraan dituntut untuk bersikap. Dari kedua teori ini (antara teori dagang dan teori negara) akhirnya berhadap-hadapan dengan rakyat sebagai objeknya, sementara rakyat pada hakekatnya si pemilik kedaulatan dan si pemilik tanah dan air negeri ini yang sesungguhnya seringkali dirugikan.

Saat pemerintah atau negara selenggarakan pemilu kenyataannya hanya dari suara rakyatlah mereka membutuhkan suara rakyat, bukan harapkan suara dari para binatang apalagi dari jin dan mahluk seperti dedemit dan bangsa syaitan. Hal yang sama terjadi saat produksi barang dagangan yang dibuat oleh para pengusaha dan dipasarkan oleh para pedagang dan tengkulak yang akan membelinya juga mereka para rakyat ramai sebagai konsumennya dan bukan dipasarkan untuk khalayak binatang atau jenis mahluk lain.

Bukan pula untuk segelintir pejabat pemerintah atau pejabat negara, karena uang yang ada di kas negara bukanlah milik mereka tetapi milik negara atau milik rakyat karena harus seizin rakyat lewat wakil rakyat yang dulu pernah dipilih oleh suara rakyat.

Walaupun sulit untuk memahami paradigma berpikir para pengusaha yang pikirannya hanya ingin terus beruntung dan terus beruntung tetapi seakan tidak pernah mau merugi sehingga seringkali terkesan tak peduli dengan kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakatnya seperti yang baru saja terjadi.

Menimbun keuntungan hingga tujuh keturunan mencerminkan ketiadaan nilai-nilai filosofi kenegaraan yang selama ini diajarkan sejak di sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, sehingga sebagian kalangan berani mengatakan jika kini sekolah justeru ajarkan filosofi kapitalis. Adapun filosofi usaha; ‘dituntut terus untung sehingga terus ekspansi’ menjadi kenyataan di era modern seperti saat ini. Sementara filosofi negara; mensejahterakan kehidupan bangsa, justeru berasaskan keadilan sosial yang menuntut nilai-nilai kerakyatan, kesalehan sosial, kepedulian antar sesama, jiwa gotong-royong seperti yang sering dicontohkan oleh para guru dan dosen saat membahas nilai-nilai filosofi Pancasila dan kearifan lokal yang terus ditanamkan.

Berbeda dengan filosofi para pengusaha yang cenderung terkesan tidak peduli dengan sesama, dengan kebutuhan dan penderitaan masyarakat luas. Bahkan terkesan seakan mereka hanya menumpang hidup di suatu negara yang suatu saat dengan mudahnya dapat memindahkan depositonya ke negeri luar sana yang seringkali dilakukan seperti saat krisis politik terjadi misalnya. Sementara hasil kekayaan yang diperoleh hasil keuntungannya berdagang dari rakyat

³Lihat; St.Sularto, *Sila Pertama: Kesalehan Sosial Bangkrut, dalam; Merajut Nusantara Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2010), hal.3.

seperti yang baru saja dipertontonkan dihadapan masyarakat luas telah meraup untung besar berkat kenaikan harga minyak goreng hingga seratus persen lebih selama beberapa bulan.

Murtadha Mutahhari dalam kesimpulannya tentang masyarakat dan sejarah (Kritik Islam atas Marxisme dan teori lainnya), menggarisbawahi bahwa bangun dan jatuhnya suatu masyarakat seperti yang telah diterangkan karena faktor bendawi dan ekonomi saja tetapi juga karena faktor kebobrokan moral.⁴

Hal senada juga disebutkan oleh Suedjatmoko bahwa pendidikan agama dan akhlak agama sangat penting ditanamkan ke segenap anak bangsa di seluruh strata pendidikan formal di negeri ini karena kelak akan berfungsi dijadikan sebagai nilai-nilai landasan abstrak agama untuk disinkronkan dengan kenyataan hidup, juga pedoman hidup dalam kehidupan bersama sesama manusia.⁵

Oleh karena itu aspek pendidikan yang berkualitas hingga mampu menyamai negara-negara maju di dunia⁶ seperti yang selalu digembar-gemborkan menjadi tidak relevan dan sia-sia ketika pendidikan justeru merubah budaya kearah materialis dan kapitalis jauh dari nilai sosial yang bersifat kerakyatan dan kebersamaan. Jika manusia dan kehidupan ini semua telah dihitung dengan materi semata maka hakekat humanisme sosialpun akan segera lenyap dari permukaan negeri ini.

C. Filosofi Luhur Bangsa: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sementara di sisi yang sama berhadapan langsung tontonan gratis yang dipertunjukkan lewat berita-berita di televisi atau media massa lainnya, medsos, hingga tontonan secara langsung atau *live* yang terjadi di tengah masyarakat berupa antrian panjang ibu-ibu yang harus mengular sekian meter bahkan sekian belas meter selama berjam-jam hanya untuk dapatkan minyak goreng satu liter atau dua liter demi kebutuhan dapur keluarganya.

Betapa lemahnya posisi negara dihadapan para pengusaha pemilik pabrik minyak goreng yang sedang berperan sebagai petualang pasar guna dapatkan keuntungan berlipat ganda, sementara rakyat baru saja selesai *lockdown* yang ingin mulai beraktifitas setelah 2 tahun lamanya dilarang untuk beraktifitas karena virus covid-19.

Sekalipun akhirnya muncul kebijakan pelarangan eksport minyak goreng, nyatanya harga masih melambung tinggi karena distribusi masih diberikan kepada swasta secara penuh. Sementara pemerintah lewat lembaganya seperti BULOG hanya sedikit saja mendapat porsi pengelolaan pendistribusian bahan pokok ini. Hendaknya diberi keleluasaan lembaga negara seperti BULOG ini dalam mengelola beberapa bahan pokok seperti beras, minyak, pupuk, BBM, tepung-gandum, gula, dan bahan pokok lainnya agar stabilitas pangan tetap terjaga di masyarakat karena inilah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas keadilan sosial yang telah disinggung di atas.

⁴Murtadha Mutahhari, *Masyarakat Dan Sejarah –Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya-* (Bandung: Mizan, 1986), hal. 201-204

⁵Soedjatmoko, *Menjadi Bangsa Terdidik* (Jakarta: Kompas, 2010), hal.118.

⁶Azhar Kasim dkk, *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance* (Jakarta: Kompas, 2015), hal.273.

Bukannya diserahkan secara keseluruhan kepada pasar bebas, karena negeri ini bukan negeri pasar bebas seperti di Barat sana (juga bukan negeri sosialis-komunis yang kesemuanya dikuasai oleh negara) sehingga harga bisa dimainkan oleh para pengusaha yang memiliki modal besar. Sementara tanah, air, hutan, kebun, dimiliki oleh negara ini guna kemaslahatan rakyatnya diabaikan begitu saja seakan tanpa mereka para pengusaha semua hasil perekonomian tidak bernilai apa-apa. Filosofi bernegara menyebutkan seperti yang telah disebutkan oleh UUD 1945 bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara guna kemaslahatan rakyat seluas-luasnya.

Dengan kata lain jika ada perilaku pengusaha atau sekelompok orang yang telah melawan secara jelas-jelas terhadap filosofi bernegara negeri ini maka mereka telah jelas-jelas berkhianat dengan cita-cita luhur berdirinya negeri ini seharusnya juga ditindak secara tegas pula.

Kalangan menengah keatas tidak terlalu terganggu dengan naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak gorengan dari pasaran tetapi lain halnya dengan jutaan bahkan puluhan juta rakyat menengah ke bawah negeri ini yang sedang alami kesusahan ekonomi akibat hantaman krisis covid-19 yang berakibat langsung dalam perekonomian rakyat membuat semakin runyam dan susah.

Sebagian politisi dan pengamat yang selama ini cerdas bermain kata-kata dalam berargumentasi tentang berbagai isu sosial terutama politik kekuasaan, saat minyak goreng susah di pasaran menjadi terdiam seribu bahasa. Sebagaimana para dermawan yang biasanya bagi-bagikan sembako jelang pemilu, pilkada, pilpres yang rajin bagi-bagikan berbagai bahan pokok makanan yang dulu masuk ke kampung-kampung, rt rw, hingga dari pintu ke pintu warga menjadi sunyi sepi.

Jika konsep negara ideal menurut Indonesia adalah berkeadilan sosial seperti telah disinggung di atas, maka menurut teorinya al-Farabi seorang ulama dan ilmuan yang banyak beri kontribusi perihal teori kenegaraan di abad pertengahan saat dunia Barat masih alami kegelapan karena dominasi doktrin kaum gerejani dan istana. Negara yang baik atau negara yang ideal ialah negara yang dipimpin oleh seorang bijaksana yang terlepas dari ketergantungan pada dunia. Menurutnya negara yang ideal adalah keikutsertaan elemen warga masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing yang ia ibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ tubuh yang dimilikinya. Sementara pemimpin itu diibaratkan sebagai *al-Qalb* atau jantungnya, yang mampu mengarahkan denyut pergerakan seluruh tubuh manusia guna mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dengan koridor nilai-nilai agama sebagai dasarnya.⁷

Dengan kata lain landasan moral, akhlak, agama, sejak dahulu kala telah menjadi koridor panutan bagi manusia guna mencapai kehidupan yang dicita-citakan seperti keadilan sosial yang telah dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini, seperti dipertegas dalam salah satu silanya; Ketuhanan YME menjadi landasan ideal bagi seluruh sila yang ada. Bentuk monopoli atau penguasaan seperti yang dipraktekkan oleh para oligarki tidaklah termasuk nilai ideal yang ada

⁷Lihat; Moh.Asy'ari Muthhar, *The Ideal State Perspektif al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal-* (Yogyakarta: IRCISoD, 2018), hal.349-350.

tetapi justeru itu merupakan nilai tercela yang tidak memiliki landasan hukumnya baik secara hukum positif, negara, apalagi moral-agama.

SIMPULAN

Pada teori filosofi kenegaraan lazim dikenal dengan istilah nasionalisasi sebagaimana di teori sosial-ekonomi juga dikenal dengan istilah swastanisasi, dua mata uang yang saling berlawanan akan selalu digunakan. Di zaman era awal kemerdekaan seorang presiden Sukarno pernah beberapa kali menasionalisasikan perusahaan asing agar negara peroleh keuntungan dan kemaslahatan yang lebih besar dibanding jika itu dikelola oleh swasta, maka negara dan rakyat akan terus dirugikan bahkan akan terancam.

Bisa saja negara dapat mengambil alih lahan-lahan kebun kelapa sawit milik swasta itu untuk dimiliki oleh negara agar kemaslahatan negara dan rakyat terjamin, sebagaimana juga dapat terjadi di sektor-sektor lain yang dapat saja diambil alih oleh negara karena demi kemaslahatan yang lebih besar tentu akan lebih diutamakan dibanding gejolak sosial rakyatnya menjadi taruhannya.

Gammal Abdul Nasser misalnya harus mengambil alih perusahaan terusan Suez yang dimiliki oleh pihak swasta dari perusahaan tiga negara; Inggris, Perancis, dan Israel walau dengan harus peperangan, karena dianggap telah mengancam kemaslahatan rakyat dan negara secara bersamaan. Menurut bahasa pers pada zaman itu 'ibarat negara dalam negara' karena begitu kuatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh perusahaan swasta sekalipun di dalam negeri Mesir saat itu. Dalam sejarahnya perusahaan swasta itu berani mengatur kebijakan negara karena memiliki kapital yang tidak sedikit dari hasil pemasukan kapal-kapal laut yang melintas dari Eropa menuju Asia dan sebaliknya. Sementara negeri Mesir dan rakyat Mesir pemilik sah tanah dan laut yang ada di semenanjung Sinai dan kanal Suez itu hanya gigit jari, karena seluruh keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan swasta itu diangkut ke luar negara Mesir.

Akankah kebun-kebun sawit, lahan-lahan tambang batubara, dan lahan-lahan lain yang menghasilkan devisa milyaran dolar hingga triliunan rupiah dari perut bumi negeri ini terus dikuras dan uangnya diangkut ke luar negeri atau disimpan oleh segelintir cukong-cukong yang suatu saat dapat henggang ke luar negeri karena alasan klise.

Keadilan sosial disamping sebagai landasan filsafat juga sebagai intisari dari peradaban negeri ini sekalipun di era globalisasi seperti sekarang ini, justeru memiliki dua proposisi⁸; memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya juga jika terjadi suatu ketimpangan ekonomi dan sosial harusnya dihilangkan karena menganut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara keadilan sosial itu akan terwujud setidaknya jika empat aspek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari turut mendukungnya dalam realisasikan kesejahteraan atau terwujudnya keadilan sosial di bidang; 1. Lembaga politik yaitu pemerintah, negara, dan segenap

⁸Munir Fuady, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam; Hukum Dan Keadilan –Aspek Nasional dan Internasional-* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hal.163.

aparaturnya. 2. Lembaga hukum yaitu peradilan dan perangkatnya. 3. Lembaga ekonomi yaitu pedagang dan pengusaha. 4. Lembaga keagamaan yaitu para ulama dan para ahli agama.⁹

DAFTAR PUSTAKA

1. Dasuki, Mohamad Ramdon (2015). *Teori Keadilan Sosial al-Ghazali Dan John Rawls -Studi Perbandingan Dalam Konteks Politik Dan Hukum-* Ciptat: Cinta Buku Media.
2. Fuady, Munir (2013). *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam; Hukum Dan Keadilan –Aspek Nasional dan Internasional-* .Jakarta: PT Rajagrafindo.
3. Kasim, Azhar (2015), *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance* . Jakarta: Kompas.
4. Mutahhari, Murtadha(1986). *Masyarakat Dan Sejarah –Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya-* . Bandung: Mizan.
5. Muthhar, Moh.Asy'ari (2018), *The Ideal State Perspektif al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal-* Yogyakarta: IRCISoD
6. Soedjatmoko(2010). *Menjadi Bangsa Terdidik*. Jakarta: Kompas.
7. St.Sularto(2010). *Sila Pertama: Kesalehan Sosial Bangkrut, dalam; Merajut Nusantara Rindu Pancasila* . Jakarta: Kompas.
8. Wikipedia.*Oligarchy*.

⁹ Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial al-Ghazali Dan John Rawls -Studi Perbandingan Dalam Konteks Politik Dan Hukum-* (Ciptat: Cinta Buku Media, 2015), hal.305.